

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang ditemukan oleh peneliti mengenai Kendala-Kendala Dalam Tata Kelola Administrasi Kependudukan Di Desa Poco Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Adapun kesimpulannya yaitu:

1) Sumber Daya Aparatur

Yaitu keterbatasan jumlah dan kapasitas perangkat Desa di bagian Administrasi Kependudukan yaitu dimulai dari jumlah pegawai, perangkapan jabatan dan penguasaan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan juga telah mengikuti aturan yang ada.

2) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Untuk itu aparat desa sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan bersama masyarakat untuk membahas akan pentingnya mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan jika ingin mengurus surat atau berkas yang diinginkan. Dalam hal menjaga relasi aparat desa masih kurang dalam menjalin relasi yang baik dengan masyarakatnya sendiri sehingga menyulitkan terjalinnya komunikasi yang baik antar masyarakat dengan Aparat Desa

3) Sarana dan Prasarana

Aparat Desa Poco sudah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat jika ada keperluan di kantor desa, sarana dan prasarana yang disediakan yaitu berupa komputer, mesin printer, TV, speaker, meja, kursi, lemari, Wi-Fi, toilet, tempat sampah. Akan tetapi sarana dan prasarana tersebut belum direalisasikan dengan baik,

dalam hal ini masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati sarana dan prasarana tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti dari penelitian ini, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan sosialisasi dan penyuluhan lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya melengkapi segala persyaratan yang harus dibawa jika ingin mengurus berkas atau surat yang dibutuhkan.
- 2) Sebaiknya untuk penggunaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa Poco lebih memberikan kebebasan untuk digunakan oleh warganya, akan tetapi tetap memperhatikannya agar sarana dan prasarana tersebut bisa bertahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khaidir & Agung Saputra, 2020. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. Medan: Warta Dharmawangsa. Hal. 602-614
- Anhika Lesmana R. 2017. *Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Bandung: Universitas Padjadjaran. Hal. 87-102.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance (GCG)*. Tentang lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate government atau tata kelola yang baik. Jakarta: Ray Indonesia. Hal.42
- Edmundus Klau. 2019. *Tata Kelola Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Aparatur Kecamatan (Studi kasus di Kantor Camat Wewiku Kabupaten Malaka)*. Hal.6
- Friadly Lembong. 2017. *Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat*. Hal.6
- Halkier Bente, Tally Katz-Gerro, and Lydia Martens. 2011. *Menerapkan Teori Praktik Untuk Mempelajari Konsumsi: Pertimbangan Teoretis dan Metodologis*. Jurnal Budaya Konsumen. Denmark: Department of Communication, Business and Information. Hal. 3-13
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 13
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 23
- HB, Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 135
- Nurcholis, Hanif. 2018. *Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi Keempat. Jakarta: Bee Media Pustaka. Hal. 1-3
- PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016. Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Ridolof Batilmurik. 2015. *Pentingnya Administrasi Pemerintahan Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura*. Hal.7
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima: Mencegah Pembelotan dan Membangun Costumer Loyalty*. Hal.85
- Rukayat, Yayat. 2017. *Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Hal. 63-64

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Terbitan Bandung: PT. Mandar Maju. Hal.3

Sinambela, Lajjan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 5

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 145

Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan